

DAFTAR PUSTAKA

- Annisaningrum. (2010). *Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan*. blogger. Diakses pada 01 februari 2022. Dari <http://annisaningrum.blogspot.com>.
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21-42.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta : BPKRI
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2005) *Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : BPKRI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah*. Jakarta : BPKRI
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta : BPKRI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta : BPKRI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : BPKRI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020) *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : BPKRI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 4 Ayat 7 No.37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : BPKRI.
- Bastian, Indra. (2014). *Audit Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.

- Bharata, R. W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (RSUD) Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. *KOMPETENSI*, 13(1).
- Biduri, S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Umsida Press, 1-197.
- Faizah, N. (2011). *Inovasi kurikulum Total Quality Management (TQM) di SMA Khadijah Surabaya* (Doctoral dissertation, IAIN Sunan Ampel Surabaya).
- Halim,A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintahan Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Ibrahim, P. S. D. (2015). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Akuntabilitas, Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI* (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Jakarta-Menteng).
- Ilmiyah, M. (2022). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada pemerintah kabupaten gowa*.
- Kamal (2021). *Akuntansi Sektor Publik: Pengertian Menurut Ahli, Tujuan dan Jenis*. . gamedia blog. Diakses pada 25 Januari 2022 dari <https://gamedia.com>.
- Khikmah, A. (2014). Pengukuran kinerja pemerintah daerah Kabupaten lamongan berdasarkan konsep value for money. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, 3(1).
- Laoli, V. (2019). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value of Money pada Pemerintah Kabupaten Nias. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 91-102.
- Muchlisin R. (2020, 09 Mei). *Akuntabilitas (Pengertian, Prinsip, Dimensi dan Jenis-jenis)*. Kajian Pustaka. Diakses pada 10 Februari 2022 di <https://www.kajianpustaka.com>.
- Muchlisin R. (2020, 09 Mei). *Konsep Value for Money (Pengertian, Prinsip, Dimensi dan Jenis-jenis)*. Kajian Pustaka. Diakses pada 10 Februari 2022 di <https://www.kajianpustaka.com>.
- Paramita, R. W. D., & Rizal, N. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bantul: Azyan Mitra Media.
- Pratolo, S. (2008). Transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan perwujudan keadilan dan kinerja pemerintah daerah: Sudut pandang aparatur dan masyarakat di era otonomi daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 9(2), 108-124..

- Rahman, W. A. (2021). *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16-28.
- Suliyanto, D. (2020). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smk Negeri Senduro Kabupaten Lumajang. *Counting: Journal of Accounting*, 3(1), 38-46.
- Taufiq, M. (2019). *Aspek Hukum Ekonomi*. Bantul: Azyan Mitra Media
- Taufiq, I. (2015). Transparency and accountability in the Qur'an and its role in building good governance. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4), 73-81.
- Tundunaung, L., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148-152.
- Wiranto, T. (2012). *Akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik*. Departemen informasi dan komunikasi. Diakses pada 01 februari 2022. <http://depkominfo.go.id>.
- Welly, W., Arifin, M. S., Ghozali, R., & Sabrina, N. (2021). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Se-Jawa Bali. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 157-167.